

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN  
HIBAH, DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA  
MODAL KOTA LANGSA PERIODE 2011-2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



**Oleh:**

**ZAHRATUL SYAFARAH**

**NIM: 4012017068**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019” an. Zahratul Syafarah, NIM 4012017068. Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 3 November 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah.

Langsa, 3 November 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

**Penguji I**



**(Dr. Early Ridho Kismawadi, MA)**

NIP. 19891111 202012 1 015

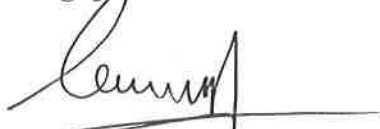
**Penguji II**



**(Chahayu Astina, SE, M, Si)**

NIP. 19841123 20193 2 007

**Penguji III**



**(Dr. Mulyadi, MA)**

NIP. 19770729 200604 1 003

**Penguji IV**



**(Shelly Midesia, SE, M, Si, Ak)**

NIP. 19901112 201903 2 007

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



**(Dr. Iskandar, M.CL)**

NIP. 19650616 199503 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zahratul Syafarah

Nim : 4012017068

Tempat/Tgl. Lahir : Meunasah Tunong, 13 Februari 1999

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (PBS)

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Dusun Pante Bidari, Desa Keude Baro, KEC. Pante Bidari,  
KAB. Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 05 Agustus 2021



Yang Menyatakan

*Zahratul Syafarah*  
**Zahratul Syafarah**

NIM. 4012017068

## MOTTO

*“Barang Siapa Yang Bersungguh-sungguh Maka Dia  
Akan Mendapatkannya”*

*“Allah selalu memberi yang terbaik bagi hamba-Nya. Cukup Allah sebagai  
penolong dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung”.*

**(QS. Al- Imran: 173)**

*“Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan disetiap kesempatan, tapi orang yang  
optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan”.*

**Ali Bin Abi Thalib**

*“Jangan pernah malu dan takut untuk sukses, karena sebanyak apapun yang  
mencaci atau meragu kita , maka sebanyak itu jugalah yang akan  
mendukung kita apabila kita berhasil meraihnya”.*

**Sherly Annavita Rahmi**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji beserta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan rahmat-Nya, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak lupa pula shalawat beriringkan salam kepada baginda panutan alam Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, kepada Ayah Zulkifli (Alm) dan Ibu Safrida yang saya hormati dan saya banggakan. Tak hentinya saya berterimakasih, yang selalu memberikan semangat, yang senantiasa selalu mendoa'akan dan memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.
2. Kepada saudara kandung saya, yaitu abang saya Muhammad Wali, kakak saya Zakiyah Darajat dan Hajjatul Musra, Adik saya Asrarullah serta kembaran saya Zahratul Syifa, yang telah memberikan doa kepada saya untuk menjadikan panutan mereka agar selalu bersemangat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
3. Kepada sabahatku dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tempat saya menuntut ilmu yakni IAIN Langsa. Terkhusus kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan jurusan saya Perbankan Syariah tempat penulis menuntut ilmu.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Pendapatan Hibah (X2), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) terhadap Belanja Modal (Y) kota Langsa periode 2011-2019. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $Y=1446,080+0,854(X1)-9,514(X2)+1,789(X3)$ . Hasil yang diperoleh menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,289 > 2,570$ ) dengan signifikansi  $0,022 < 0,05$ . Pendapatan Hibah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-2,903 > 2,570$ ) dengan signifikansi  $0,034 < 0,05$ . Dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,553 > 2,570$ ) dengan signifikansi  $0,003 < 0,05$ . Hasil pada uji F menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kota Langsa pada periode 2011-2019 dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $48,915 > 5,14$ ). Penelitian ini masih sangat sederhana dengan menggunakan periode pendek hanya berkisar 9 periode maka hasil penelitian ini kemungkinan besar masih saja bisa berubah tergantung dari jumlah data didapat. Oleh sebab itu peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat melengkapi data penelitian ini sehingga didapat hasil yang lebih akurat. Untuk pemerintah agar memperbanyak jumlah Pendapatan PAD dari pada Pendapatan Hibah, karena terbukti dari hasil penelitian bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal**

## ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Original Income (PAD) (X1), Grant Income (X2), and Special Allocation Funds (DAK) (X3) on Capital Expenditure (Y) Langsa City for the 2011-2019 period. The type used in this study uses quantitative methods with multiple linear regression analysis. The results showed that  $Y = 1446,080 + 0,854(X1) + 9,514(X2) + 1,789(X3)$ . The results obtained show that Local Revenue (PAD) has a positive and significant effect on Langsa City Capital Expenditures where  $t_{count} > t_{table}$  ( $3,289 > 2,570$ ) with a significance of  $0,022 < 0,05$ . Grant income has a negative and significant effect on Langsa City Capital Expenditure where  $t_{count} > t_{table}$  ( $-2,903 > 2,570$ ) with a significance of  $0,034 < 0,05$ . And Special Allocation Fund Income (DAK) has a positive and significant effect on Langsa City Capital Expenditure where  $t_{count} > t_{table}$  ( $5,553 > 2,570$ ) with a significance of  $0,003 < 0,05$ . The results of the F test show that there is a simultaneous positive and significant effect of the Regional Original Revenue (PAD), Grant Income, and Special Allocation Funds (DAK) on Langsa City Capital Expenditures in the 2011-2019 period with a value of  $F_{count} > F_{table}$  ( $48,915 > 5,14$ ). This research is still very simple using a short period of only around 9 periods, so the results of this study are likely to change depending on the amount of data obtained. Therefore, the research suggests that further research can complement the data of this study so that more accurate results are obtained. For the government to increase the amount of PAD Revenue from Grant Income, because it is evident from the results of research that PAD and DAK have a positive and significant effect on Capital Expenditures.

**Keywords : Regional Original Income (PAD), Grant Income, Special Allocation Funds (DAK) and Capital Expenditures.**

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te(dengan titik dibaah)



ظ	Za	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	KasrahI	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سَيْلٌ
Kaifa	=	كَيْفٌ
Haula	=	هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
---------	---	----------

Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Hajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمَ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَيْعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنتَ الْرَّازِقِينُ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān Fa auful- kaila wa-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ مَا سَطَّ عَلَى يَهُسْبِيلاً

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتَحَ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāahil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019”**. Tidak lupa pula shalawat bermahkotakan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Langsa guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam proses penyelesaiannya. Berikut penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia, nikmat rezeki, nikmat kesehatan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Ayah Zulkifli (Alm) dan Ibu Safrida, yang selalu mendoakan saya dan membesarkan saya dengan tulus dan ikhlas sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



4. Bapak Dr. Iskandar, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan motivasi kepada para mahasiswa.
5. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA dan Chahayu Astina, S.E, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
6. Bapak Fakhrizal Bin Mustafa, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
7. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat serta menjadi pribadi yang berkualitas.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku yakni Ajeng Feby Pangga dan Ayu Afrillia yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat untuk terus menuju kesuksesan.
11. Sahabat bisnis yaitu Salwa Indah Sari, Nurmawaddah, dan Yuni Zahara
12. Teman-teman terkocak "2x6" yang selalu mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

13. Terimakasih kepada teman-teman unit 2 Perbankan Syariah angkatan 2017 yang sama-sama saling mendukung dan berjuang dalam pembuatan skripsi.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal kepada semua yang telah membantu dan mendukung saya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarekan keterbatasan waktudan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu diharapkan kiranya bagi para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan menjadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal

**Langsa, 01 Agustus 2021**

**Penulis**

**Zahratul Syafarah**  
**NIM. 4012017068**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Batasan Masalah .....	11
1.4 Perumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	12
1.6 Penjelasan Istilah .....	12
1.7 Manfaat Penelitian .....	14
1.8 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
2.1 Belanja Modal .....	17
2.1.1 Pengertian Belanja Modal .....	17
2.1.2 Macam-macam Belanja Modal .....	18
2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal .....	19
2.1.4 Peranan Belanja Modal .....	21
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	22
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	22
2.2.2 Klarifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	23
2.2.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	25

2.3 Pendapatan Hibah.....	26
2.3.1 Pengertian Pendapatan Hibah .....	26
2.3.2 Jenis-jenis Bantuan Pendapatan Hibah .....	27
2.3.3 Penyaluran Pendapatan Hibah .....	27
2.3.4 Kriteria Penerima Hibah .....	28
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	29
2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	29
2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)..	29
2.4.3 Pengalokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	30
2.5 Penelitian Terdahulu .....	30
2.6 Kerangka Pemikiran.....	38
2.7 Hipotesis.....	40
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4 Definisi Operasional .....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1 Regresi Berganda .....	43
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	44
3.6.3 Uji Hipotesis.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Perekonomian Kota Langsa.....	50
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	53
4.2.1 Analisis Deskripsi .....	53
4.2.2 Deskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	54
4.2.3 Deskripsi Pendapatan Hibah .....	55
4.2.4 Deskripsi Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	56
4.2.5 Deskripsi Belanja Modal.....	57
4.3 Hasil Penelitian .....	58
4.3.1 Uji Asumsi Klasik .....	58
4.3.2 Uji Regresi Berganda .....	62
4.3.3 Uji Hipotesis.....	64
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	70
4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal	70
4.4.2 Pengaruh Pendapatan Hibah Terhadap Belanja Modal .....	71
4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal .	72
4.4.4 pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Belanja Modal .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan .....	74

5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal.....	39
4.1 Peta Kota Langsa.....	52
4.4 Uji Scatterplot .....	62

## DAFTAR TABEL

### Tabel

2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
4.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal .....	53
4.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa Periode 2011-2019.....	54
4.3 Pendapatan Hibah Kota Langsa Periode 2011-2019 .....	54
4.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Langsa Periode 2011-2019 .....	56
4.5 Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019 .....	57
4.6 Hasil Uji Normalitas .....	59
4.7 Uji Multikolinieritas.....	60
4.8 Uji Multikolinieritas.....	60
4.9 Uji Autokorelasi .....	61
4.10 Hasil Uji Regresi Berganda.....	63
4.11 Uji T .....	65
4.12 Penjelasan Hasil Uji T.....	66
4.13 Hasil Uji F.....	68
4.14 Hasil Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	69

## **DAFTAR GRAFIK**

### **Grafik**

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019 .....	5
1.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019 .....	7
1.3 Pendapatan Hibah dan Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019 .....	8



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal .....	81
Lampiran 2 Hasil Analisis Pengolahan Data SPSS 23.0 .....	82
Lampiran 3 Tabel T.....	86
Lampiran 4 Tabel F.....	88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Belanja Modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Pesatnya pembangunan daerah menyangkut perkembangan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah, mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayain kegiatan tersebut.<sup>1</sup>

Anggaran Daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>2</sup> Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Harapannya yaitu jika PAD terealisasi dengan baik maka dapat mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya peningkatan

---

<sup>1</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2014)., h. 112

<sup>2</sup>Aulia Feriza dan Meita Jumiarti, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Langsa Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*, (Langsa; Badan Pusat Kota Langsa, 2019)., h. 78-79

Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Belanja Modal sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat.<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Seperti halnya yang tertuang dalam Al-Qur'an kepemimpinan sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Islam telah menurunkannya nilai-nilai mengenai kepemimpinan dalam ayat Al-Qur'an QS. Al-Anbiya (21) : 73 yang berisi sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ  
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ<sup>4</sup>

Artinya : “Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.”

Allah menyebutkan dalam ayat ini tambahan karunia-Nya kepada Nabi Ibrahim, yaitu keturunan Nabi Ibrahim merupakan orang-orang yang saleh. Tidak hanya itu, keturunan Nabi Ibrahim akan menjadi imam atau pemimpin umat yang mengajak orang untuk menerima dan melaksanakan agama Allah. Kemudian

---

<sup>3</sup> Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 06 Juli 2021 pada jam 12:31 WIB

<sup>4</sup> Al-quran, surah Al-anbiya aya 73, ( Halim Publishing & Distributing:2018), h. 328

mereka mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat berdasarkan perintah dan izin Allah.<sup>5</sup>

Menurut penuturan Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan upaya para Nabi menyebarkan kebaikan kepada lingkungan mereka. Allah menjadikan mereka para Nabi sebagai teladan-teladan yang memberi petunjuk kepada masyarakatnya. Para Nabi juga mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berdasarkan perintah Allah. Para pemimpin mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat berdasarkan perintah dan izin Allah.<sup>6</sup>

Kata a'immah adalah bentuk jamak dari ima>m. Kata tersebut seakar dengan kata ama>m yang berarti di depan dan umm yang berarti ibu. Seseorang yang di depan biasanya diikuti atau dirujuk. Dari sini, umm atau ibu menjadi tempat rujukan anak. Hal tersebut juga sama dengan imam. Ia diteladani dalam sikap dan perbuatannya. Kata yahdu>na pada ayat di atas tidak dirangkaikan dengan kata ila>. Jika kata yahdu>na disertai dengan kata ila>, maka ia mengisyaratkan, bahwa yang diberi petunjuk belum berada pada jalan yang benar. Jika tidak menggunakan kata ila>, maka pada umumnya ini mengisyaratkan, bahwa yang diberi petunjuk telah berada pada jalan yang benar. Akan tetapi, ia belum mencapai tujuan. Oleh karena itu, ia masih diberi petunjuk untuk menjaminnnya sampai ke tempat tujuan. Jika pendapat ini diterima, maka ayat di atas mengisyaratkan, bahwa orang yang memberikan petunjuk tersebut memiliki kemampuan yang melebihi rata-rata

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 6., hal. 286.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 8., hal. 482

anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, ia membimbing masyarakatnya ke arah yang lebih baik dan sempurna.<sup>7</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah dipandang sebagai suatu kewajiban dalam menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal sehingga diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Namun disisi lain, anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. DAK ini menekan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Adapun pendapatan lain-lain yang salah satunya meliputi Pendapatan Hibah yang bersumber juga dari APBD, Pendapatan hibah perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut karena pemberian hibah itu sendiri dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.<sup>8</sup>

Begitupun di Kota Langsa, yang merupakan salah satu Kota Madya di Provinsi Aceh yang sedang mengalami proses pembangunan tentunya PAD, Dana Hibah dan DAK sangat berperan penting bagi Belanja Modal di Kota Langsa. Salah satu pemasukan daerah yang mempengaruhi Belanja Modal dalam penelitian ini adalah PAD Kota Langsa.<sup>9</sup>

Merealisasikan PAD sesuai dengan target PAD yang telah ditentukan sangatlah penting. Mengingat PAD merupakan rencana besar pemerintah dalam

---

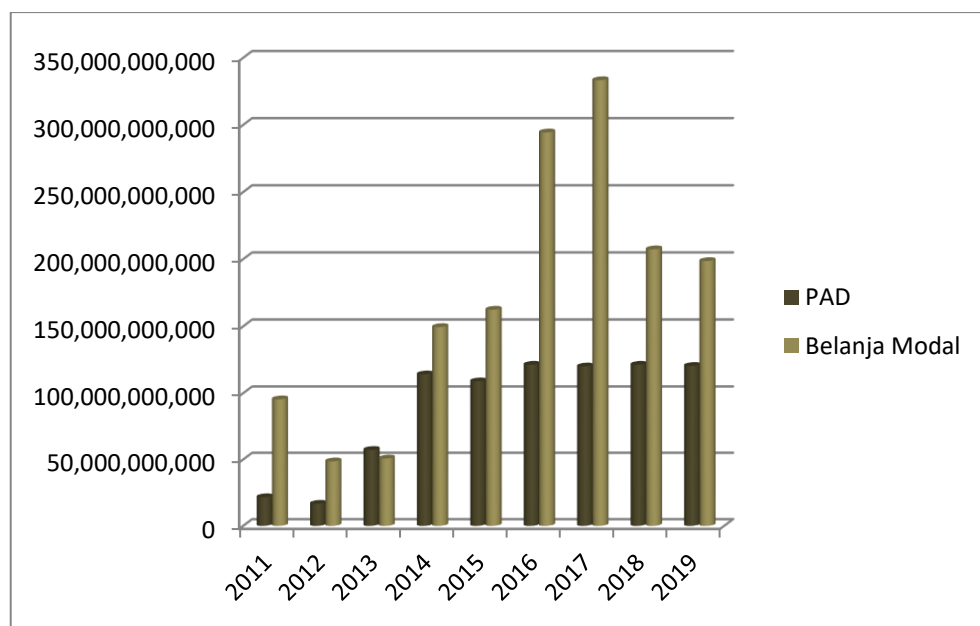
<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 483

<sup>8</sup>Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 06 Juli 2021 pada jam 12:36 WIB

<sup>9</sup>Tgk. Usman Abdullah, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Langsa 2016*, (Langsa: Pemerintah Kota Langsa, 2017), 3

meningkatkan Belanja Modal. Namun kenyataannya, di Kota Langsa realisasi PAD setiap tahunnya terjadi belum mampu meningkatkan Belanja Modal di Kota Langsa.<sup>10</sup> Hal ini dapat dibuktikan dari grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Kota Langsa pada grafik 1.1.

**Grafik 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Langsa Data Telah Diolah<sup>11</sup>**

Pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa PAD mengalami penurunan yang signifikan ditahun 2011 ke 2012 sebesar 22 %, ditahun 2012 ke 2013 sebesar 243 %, dan ditahun 2013 ke 2014 sebesar 99 %. Adapun pada tahun berikutnya yaitu ditahun 2018 PAD meningkat hanya sebesar 1,1% namun kenaikan pada Belanja Modal meningkat sangat pesat sebesar 37 %. Ditahun 2019 terjadi penurunan PAD sebesar 0,7 % dan Belanja Modal juga ikut menurun sebesar 4.2 %. Penurunan

<sup>10</sup>Ibid., h.3

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pada jam 08:17 WIB

PAD pada tahun 2019 disebabkan karena realisasi PAD tidak sesuai dengan target karena pemerintah kota Langsa harus membayar tunggakan klaim pembayaran BPJS kesehatan senilai Rp 36 miliar lebih, sehingga jika tidak ada tunggakan tersebut, maka total PAD murni mencapai Rp.157 miliar lebih.<sup>12</sup>

Pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, dan DAK. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan dalam Belanja Modal. Oleh karena itu peningkatan PAD, Pendapatan Hibah dan DAK selalu diupayakan, karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan berdampak pada Belanja Modal. Keberhasilan peningkatan PAD, Pendapatan Hibah, DAK hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya dalam Belanja Modal.<sup>13</sup>

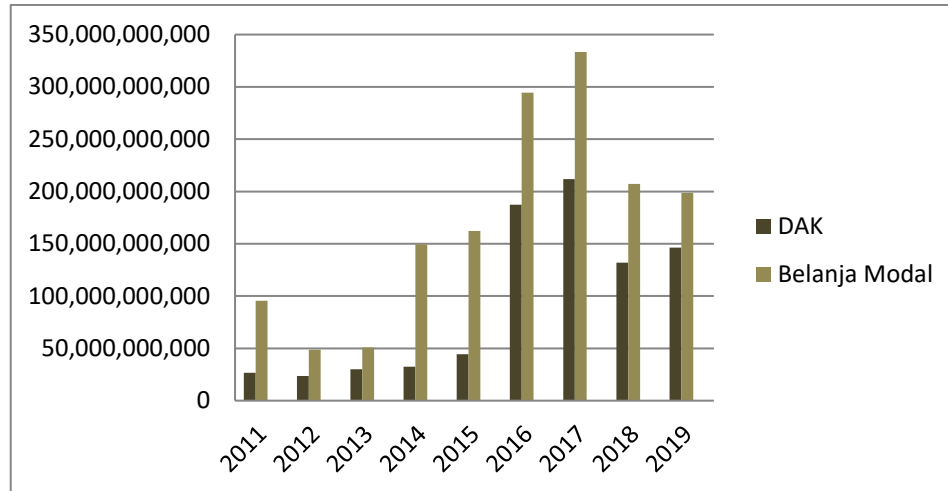
Harapannya semakin besar penerimaan DAK kota Langsa yang merupakan sumber pendapatan daerah dapat meningkatkan Belanja Modal oleh pemerintah daerah Langsa. Namun di Kota Langsa peningkatan penerimaan DAK dari sumber pendapatan daerah tidak meningkatkan Belanja Modal. Hal ini dibuktikan setiap tahunnya DAK mengalami peningkatan kecuali pada periode 2018 namun naik lagi pada tahun selanjutnya. Sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan 3 tahun berturut-turut yaitu pada periode 2017, 2018, dan 2019. Data tersebut dapat dilihat pada grafik 1,2 berikut ini.

---

<sup>12</sup>Laporan Zubir, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa, Diakses dari <http://www.aceh.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pada jam 10:17 WIB

<sup>13</sup>Dams Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Malang:UB Press, 2017), h.24

**Grafik 1.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Langsa Data Telah Diolah<sup>14</sup>**

Pada grafik 1.2 dapat dilihat bahwa DAK mengalami penurunan yang signifikan ditahun 2011 ke 2012 sebesar 11 %. Adapun pada tahun berikutnya yaitu ditahun 2019 DAK meningkat 10 %, namun peningkatan DAK tidak mampu sepenuhnya menaikkan Belanja Modal yaitu dimana Belanja Modal malah mengalami penurunan sebesar 4.2 %. Penurunan Belanja Modal pada pemerintah daerah kota Langsa dikarenakan adanya penurunan dari penerimaan daerah kota Langsa.

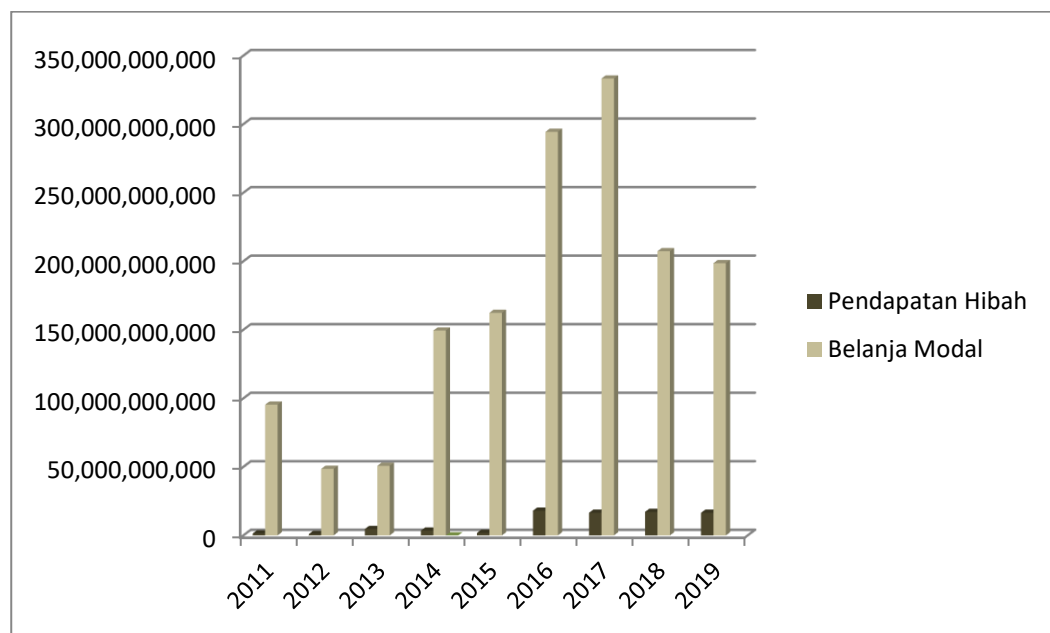
Adapun Pendapatan Hibah merupakan salah satu komponen pada penerimaan daerah otonom yaitu masuk dalam kategori Pendapatan Lain-lain yang Sah. Oleh sebab itu Belanja Modal juga dipengaruhi oleh Pendapatan Hibah. Untuk mencapai pengelolaan belanja hibah yang efektif dan akuntabel Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang disempurnakan

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pada jam 15:17 WIB



dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 Tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>15</sup> Berikut data Pendapatan Hibah dan Belanja Modal di Kota Langsa

**Grafik 1.3 Pendapatan Hibah Dan Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Langsa Data Telah Diolah<sup>16</sup>**

Pada grafik 1.3 dapat dilihat bahwa penurunan yang signifikan Pendapatan Hibah ditahun 2011 ke 2012 sebesar 26 %. Adapun pada tahun berikutnya yaitu ditahun 2013 Pendapatan Hibah meningkat sangat pesat sebesar 368 %, namun kenaikan pada Belanja Modal hanya 4,5 % saja. Ditahun 2015 terjadi penurunan Pendapatan Hibah sebesar 47,9 % yang penurunan ini merupakan penurunan terbesar namun pada tahun yang bersamaan Belanja Modal malah meningkat

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Diakses dari <http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pada jam 15:17 WIB

<sup>16</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pada jam 15:17 WIB

sebesar 8,65 %. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya dimana setiap penurunan pada pendapatan hibah belum tentu dapat menurunkan Belanja Modal kota Langsa. Sebaliknya kenaikan pada Pendapatan Hibah juga belum tentu dapat menurunkan Belanja Modal kota Langsa.

Hasil penelitian Dedy Suprianto menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.<sup>17</sup> Hasil penelitian tersebut memperkuat hasil penelitian Mayang Sari Nasution, Yeti Okta Rosiana, Santika Adhi Karyadi dan Hanisya Ursilla Lubis. Hasil-hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun dari data penelitian diketahui bahwa kenaikan dan penurunan PAD tidak selalu searah dengan kenaikan dan penurunan Belanja Modal di Kota Langsa. Sedangkan hasil penelitian Yohanes Eko Adventino menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.<sup>18</sup>

Belanja Modal yang dipengaruhi oleh DAK dibuktikan dengan hasil penelitian Santika Adhi Karyadi yaitu DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.<sup>19</sup> Dari data Belanja Modal dan DAK kota Langsa, dapat dilihat pada grafik 1.2 bahwa data Belanja Modal mengikuti jumlah data pada DAK walaupun tingkat signifikansinya belum diketahui. Namun pada tahun 2018-2019 kenaikan nilai DAK tidak diikuti dengan kenaikan Belanja Modal.

---

<sup>17</sup>Dedy Suprianto, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Nagas Raya*, (Meulaboh : Universitas Teuku Umar, 2016)

<sup>18</sup>Yohanes Eko Adventino, *Pengaruh Pendapatan Asli, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Balik Papan*, (Yogyakarta, 2016)

<sup>19</sup>Santika, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

Pada data grafik 1.3 kenaikan Pendapatan Hibah di kota Langsa tidak serta merta mampu mendorong kenaikan pada Belanja Modal di Kota Langsa. Walaupun begitu, penurunan pada jumlah Pendapatan Hibah juga tidak diikuti dengan penurunan pada Belanja Modal di kota Langsa. Dari hasil penelitian Yohanes Eko Adventino menganalisis bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.<sup>20</sup> Namun Dewi Ayu Soraya mendapatkan hasil penelitian bahwa Pendapatan Hibah berpengaruh positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan adanya gap pada hasil penelitian dan bukti pada data dan teori yang berlaku maka penulis tertarik untuk penelitian lebih memfokuskan mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerimaan PAD kota Langsa seharusnya dapat meningkatkan Belanja Modal Kota Langsa. Namun dari data yang diperoleh tidak setiap kenaikan dalam penerimaan PAD kota Langsa setiap tahunnya dapat meningkatkan Belanja Modal Kota Langsa.
2. Kenaikan jumlah DAK kota Langsa tidak selalu dapat menaikkan Belanja Modal Kota Langsa.

---

<sup>20</sup>Yohanes Eko Adventino, *Pengaruh Pendapatan Asli, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Balik Papan*, (Yogyakarta, 2016)

<sup>21</sup>Dewi Ayu Soraya, *Dampak Pemberian Hibah Pemerintah Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kelurahan Yosorejo Metro*, (Lampung, 2017)

3. Penerimaan yang signifikan dalam Pendapatan Hibah tidak diikuti dengan kenaikan yang signifikan pada Belanja Modal. Namun penurunan dalam Pendapatan Hibah juga tidak selalu menurunkan jumlah Belanja Modal di Kota Langsa.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari suatu permasalahan yang timbul dalam penelitian ini maka penelitian membatasi masalahnya dimana data diperoleh yaitu dari publikasi BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Langsa. Penelitian ini dilakukan secara *Time Series* atau berturut-turut selama 9 periode (2011-2019) dengan periode tahunan.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan penjelasan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah;

- 1.4.1 Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial terhadap Belanja Modal kota Langsa periode 2011-2019 ?
- 1.4.2 Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap Belanja Modal kota Langsa periode 2011-2019?

## 1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial terhadap Belanja Modal kota Langsa periode 2011-2019.

1.5.2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap Belanja Modal kota Langsa periode 2011-2019.

## 1.6 Penjelasan Istilah

### 1.6.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.<sup>22</sup>

### 1.6.2 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah adalah pemberian bantuan yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai *grant* dan hibah merupakan suatu bentuk bantuan yang tidak dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi agar melakukan komitmen tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 10

<sup>23</sup>Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah* (Jakarta: Penerbit PPM, 2014), h.199

### 1.6.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.<sup>24</sup>

### 1.6.4 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>25</sup>

### 1.6.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan public, baik secara langsung ataupun tidak.<sup>26</sup>

### 1.6.6 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisish antara sejumlah yang digambarkan dalam APBD diawal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD diakhir periode.<sup>27</sup>

### 1.6.7 Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja Dan Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan

---

<sup>24</sup>Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang :UB Press, 2017), h. 24

<sup>25</sup>Yoyo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 129

<sup>26</sup>ndra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 388

<sup>27</sup> Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*,..h. 387

dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka (periode) tertentu yang akan datang.<sup>28</sup>

#### 1.6.8 Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksana Anggaran merupakan dokumen yang berisi pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.<sup>29</sup>

### 1.7 Manfaat Penelitian

#### 1.7.1 Manfaat Teoritis

##### a. Bagi Akademisi FEBI IAIN Langsa

Manfaat penelitian bagi lingkungan akademisi adalah memberikan wawasan dan pengetahuan untuk pihak akademik baik secara langsung maupun tidak langsung bagi ruang baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta sebagai bahan acuan untuk kedepan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam bagi para mahasiswa/mahasiswi, khususnya kalangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### 1.7.2 Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan dalam pengaruh tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal kota Langsa serta masukan pada penelitian yang akan datang dengan tema yang sama.

---

<sup>28</sup> M. Munanadar, *Budgeting Perencana Kerja Pengkoordinasi Kerja Pengawasan Kerja Edisi Kedua*. (Yogyakarta: BPFE,2007), h. 1

<sup>29</sup> M. Munanadar, *Budgeting Perencana Kerja Pengkoordinasi Kerja Pengawasan Kerja Edisi Kedua*,... h. 3

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan seperti biasanya menggunakan uraian singkat tentang inti sari pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam setiap bab. Dengan menggunakan sistematika penelitian yang baik dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan diteliti untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan teori-teori yang dikaji dan penelitian-penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang bagaimana cara penulisan dalam penelitian tentang pengaturan penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data dalam penelitian, sampel dan populasi, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang mendeskripsikan data penelitian, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan hasil pembahasan.



## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Belanja Modal**

##### **2.1.1 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>30</sup> Dan menurut PSAP Nomor 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Bulletin teknis Standar Akuntansi Pemerintah No 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya dan memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:<sup>31</sup>

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya sehingga menambah aset pemerintah.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>30</sup>Yoyo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*,... h. 129

<sup>31</sup>Ibid., h, 130

### 2.1.2 Macam-macam Belanja Modal

Adapun belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama yaitu :<sup>32</sup>

1) Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, untuk balik nama dan sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja peralatan dan mesin

Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kanor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dalam kondisi siap pakai.

---

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/ 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pada jam 22:15 WIB

#### 4) Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap.

#### 5) Belanja modal fisik lainnya

Merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi serta jaringan.

### **2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal**

Berdasarkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahannya, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja

honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang atau jasa.<sup>33</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal yaitu :<sup>34</sup>

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

---

<sup>33</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sipkddki. Jakarta.go.id/fites/Permendagri\_13\_2006 pdf, diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pada jam 22:15 WIB

<sup>34</sup>Noora Fahrunisah, Dan Achmad Badjuri, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015)*. (Semarang: Universitas Stikubank, 2017), h.190

#### 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan daerah yang terdiri dari : Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

### 2.1.4 Peranan Belanja Modal

Dasar hukum pembagian jenis belanja adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102.PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran. Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah.<sup>35</sup>

Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi Belanja Modal untuk pengadaan asset tetap daerah memenuhi 5 kriteria yaitu : tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat

---

<sup>35</sup>Ibid., h.114

harga. Terdapat 3 cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.<sup>36</sup>

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmat Yani merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Menurut Abdul Halim Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat 18 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 6 dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi

---

<sup>36</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/ 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pada jam 22:15 WIB

<sup>37</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 51

<sup>38</sup>Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 10

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah.<sup>39</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintahan daerah.<sup>40</sup>

### **2.2.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang digali dari potensi daerah masing-masing. Klasifikasi sumber PAD dibagi menjadi 4 yaitu :<sup>41</sup>

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Adapun jenis pendapatan pajak daerah untuk Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- g. Pajak parkir.

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah di akses pada [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) pada tanggal 06 Juli 2021 pukul 09:33 WIB

<sup>40</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, ...h. 52

<sup>41</sup>Ibid., h. 53



2) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dikelompokkan menjadi 3 yaitu :<sup>42</sup>

- a. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN,
- b. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN,
- c. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, yang tidak diklarifikasikan dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.<sup>43</sup> Daerah yang sah diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. Hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan,

---

<sup>42</sup>Ibid., h. 53

<sup>43</sup>Ibid., h. 53

<sup>44</sup>Ibid., h. 53

- b. Jasa giro,
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- h. Pendapatan denda pajak,
- i. Pendapatan denda retribusi,
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan,
- k. Pendapatan dari pengembalian,
- l. Fasilitas sosial dan umum,
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

### **2.2.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dana-dana yang bersumber dari PAD merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. PAD merupakan alat untuk memasukan uangsebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah,

serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.<sup>45</sup>

## 2.3 Pendapatan Hibah

### 2.3.1 Pengertian Pendapatan Hibah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak merugikan. Pasal 1666 KUH perdata menyebutkan hibah adalah suatu perjanjian atau dalam mana pihak yang menghibahkan, pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (*om nio*) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.<sup>46</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian bantuan yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai *grant* dan hibah merupakan suatu bentuk bantuan yang tidak dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi agar melakukan komitmen tertentu.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid., h. 54

<sup>46</sup> Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014), h. 120

<sup>47</sup> Ibid., h. 199

### **2.3.2 Jenis-jenis Bantuan Hibah**

Jenis-jenis hibah merupakan program bantuan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi social yang sebagian dirancang agar memberikan manfaat berkelanjutan agar sasaran program bantuan bias menjadi mandiri. Jenis-jenis bantuannya yaitu :<sup>48</sup>

- 1) Jenis bantuan hibah untuk masyarakat ekonomi lemah
  - a. PKH (Program Keluarga Harapan),
  - b. Bantuan raskin,
  - c. Kartu Indonesia miskin,
  - d. Kartu Indonesia sehat,
  - e. Bantuan rumah yang tidak layak huni,
  - f. Bantuan langsung sementaramasyarakat.
- 2) Jenis-jenis modal usaha hibah
  - a. Bantuan modal untuk usaha wanita rawan social,
  - b. Bantuan modal usaha hibah secara kelompok,
  - c. Bantuan modal untuk wiraswasta muda.

### **2.3.3 Penyaluran Pendapatan Hibah**

Penyaluran pendapatan hibah diberikan setelah dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antar penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Penyalur atau penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)

---

<sup>48</sup>Ibid., h. 200

bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani NPHD. NPHD paling sedikit harus memuat:<sup>49</sup>

- 1) Pemberi hibah dan penerima hibah,
- 2) Tujuan pemberian hibah,
- 3) Basaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima,
- 4) Hak dan kewajiban,
- 5) Tata cara penyerahan hibah,
- 6) Tata cara pelaporan hibah.

#### **2.3.4 Kriteria Penerima Hibah**

Kriteria penerima hibah diantaranya yaitu :<sup>50</sup>

- 1) Hibah kepada masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, periklanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non professional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 2) Kriteria penerima hibah memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. Peruntukan secara spesifikasi telah ditetapkan,
  - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,

---

<sup>49</sup>Ibid., h. 146

<sup>50</sup> Ibid., h. 146

- c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

## **2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

### **2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 24 DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>51</sup> DAK ini diprioritaskan untuk kebutuhan daerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, kepulauan dan pasca bencana. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.<sup>52</sup>

### **2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Faktor-faktor yang mempengaruhi DAK yaitu :<sup>53</sup>

- 1) Masih banyaknya daerah yang tertinggal yaitu dimana daerah tersebut kurang mampu dalam membiayai seluruh pengeluarannya. DAK berperan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.
- 2) Pembangunan yang tidak merata yaitu dimana DAK menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.

---

<sup>51</sup>Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang :UB Press, 2017), h. 24

<sup>52</sup>Ibid., h. 23

<sup>53</sup>Ibid., h. 25

- 3) Masih banyaknya pengangguran yaitu dimana DAK dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produktifitas perluasan kerja dan verisifikasi ekonomi terutama di pendesaan, melalui suatu kegiatan khusus dibidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur sehingga akan mengurangi pengangguran.

### 2.4.3 Pengalokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 145/PMK.07/2013, dalam pengalokasi DAK harus memenuhi kriteria umum, khusus dan juga teknik. Sementara dalam perhitungan alokasi DAK dilakukan dalam dua tahapan yaitu :<sup>54</sup>

- 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
- 2) Penentuan besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah.

### 2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil penelitian (Kesimpulan)
1	Dedi Suprianto, Meulaboh, Tahun 2016 <sup>55</sup>	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (X1) Pertumbuhan Belanja	1. PAD berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan

<sup>54</sup> Ibid., h. 26

<sup>55</sup>Dedi Suprianto, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya*, (Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2016)

		Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya	Modal (Y)	terhadap Belanja Modal Pemerintah di Nagan Rayan
2	Mayang Sari Nasution, Medan, Tahun 2018 <sup>56</sup>	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal (studi kasus badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten deli serdang)	Pendapatan Asli Daerah (X) Anggaran Belanja Modal (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.
3	Iman Sri Bintang, Palembang, Tahun 2019 <sup>57</sup>	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang	Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X3) Dana Alokasi Umum (X4) Belanja Modal (Y)	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Di pemerintah Kota Palembang.
4	Yeti Okta Rosiana, Lampung, Tahun 2017 <sup>58</sup>	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (X)	Hasil Penelitian ini menunjukkan

<sup>56</sup>Mayang Sari Nasution, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal (studi kasus badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten deli serdang)*, (Medan, 2018)

<sup>57</sup>Imam Sri Bintang, *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2017)



		(PAD) Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Alokasi Anggaran Belanja Modal(Y)	bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal
5	Santika Adhi Karyadi, Yogyakarta, Tahun 2017 <sup>59</sup>	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) Belanja Modal (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.</li> <li>2. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.</li> <li>3. DAK</li> </ol>

<sup>58</sup>Yeti Okta Rosiana, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

<sup>59</sup>Santika Adhi Karyadi, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

				berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 4. PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.
6	Hanisya Ursilla Lubis, Medan, Tahun 2019 <sup>60</sup>	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) Dana Bagi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

<sup>60</sup>Hanisya Ursilla Lubis, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan)*, (UINSU : Medan, 2019)

		(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan)	Hasil (DBH) (X4) Belanja Modal (Y)	
7	Nanda Dwi Novalia, Bandar Lampung, Tahun 2016 <sup>61</sup>	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung	Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. secara simultan Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
8	Yohanes Eko	Pengaruh	Pendapatan	Hasil penelitian

<sup>61</sup>Nanda Dwi Novalia, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung*, (Bandar Lampung, 2016)

	Adventino, Yogyakarta, Tahun 2016 <sup>62</sup>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Balik Papan	Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2)  Pendapatan Daerah Yang Lain Yang Sah (X3) Belanja Daerah (Y)	menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
9	Nugroho Suratno Putro, Semarang, Tahun 2010 <sup>63</sup>	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
10	Dewi Ayu Soraya, Lampung, 2017 <sup>64</sup>	Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah	Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Metro	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program

<sup>62</sup>Yohanes Eko Adventino, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Balik Papan*, (Yogyakarta, 2016)

<sup>63</sup>Nugroho Suratno Putro, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*, (Semarang, 2010)

<sup>64</sup>Dewi Ayu Soraya, *Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kelurahan Yosorejo Metro Timur*, (Lampung, 2017)

		Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kelurahan Yosorejo Metro Timur	(X1) Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat (Y)	bantuan dana hibah ini memiliki dampak yang positif terlihat dari bagaimana masyarakat fakir yang tidak memiliki pekerjaan ikut bergabung dengan melakukan usaha yang dapat membantu keuangan mereka.
--	--	---	---	--

Adapun pada penelitian Dedi Suprianto yang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel indenpenden yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen Belanja Modal dengan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan lokasi di Kabupaten Nagan Raya.

Pada penelitian Mayang Sari Nasution yang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen anggaran belanja modal dengan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan studi kasus badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten Deli Serdang.

Pada penelitian Imam Sri Bintang yang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel dependen yaitu Belanja Modal dengan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah pada peneliti tersebut menggunakan

variabel independen pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada penelitian Yeti Okta Rosiana yang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggunakan variabel dependen Alokasi anggaran Belanja Modal dengan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan lokasi di Kota Bandar Lampung.

Pada penelitian Santika Adhi Karyadi yang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan variabel dependen Belanja Modal dengan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) dan dilakukan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

Pada penelitian Hanisya Ursilla Lubis yang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan variabel dependen Belanja Modal dengan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah menggunakan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada penelitian tersebut menggunakan menggunakan studi kasus badan pengelola keuangan dan asset daerah Kota Medan.

Pada penelitian Nanda Dwi Novali yang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen Belanja Modal dengan menggunakan metode kuantitatif.

Perbedaannya adalah pada peneliti tersebut menggunakan menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi studi kasus pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Pada penelitian Yohanes Eko Adventinoyang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen Belanja Modal dengan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan menggunakan variabel independen dana perimbangan, dan dana lain-lain yang sah dan variabel dependen belanja daerah di Kota Balik Papan.

Pada penelitian Nugroho Suratno Putro yang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen belanja modal dengan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan menggunakan variabelindependen Dana Alokasi Umum dengan studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

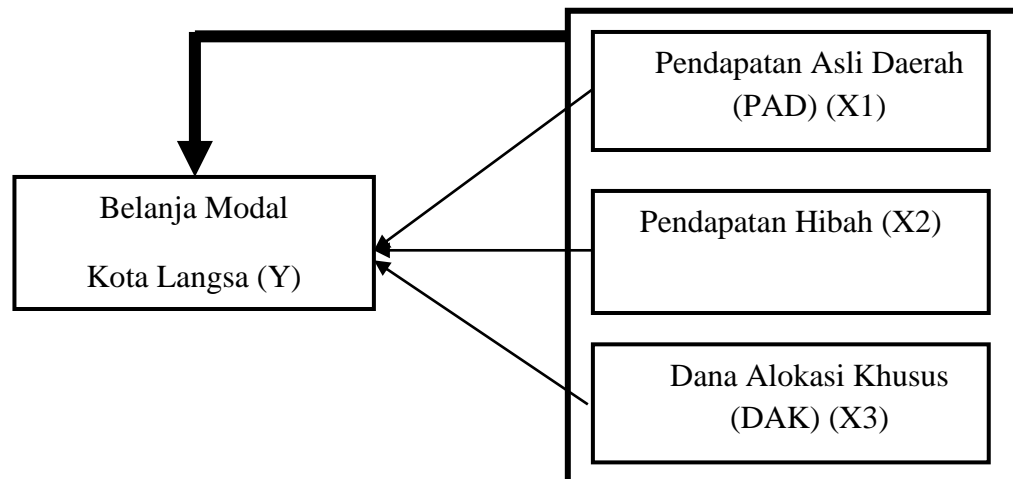
Pada penelitian Dewi Ayu Soraya yang menjadi persamaan adalah menggunakan variabel independen yaitudana hibah dan dengan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan menggunakan variabel independen peningkatan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Yosorejo Metro Timur.

## **2.6 Kerangka Pemikiran**

Pemerintah Kota Langsa membangun perkonomian daerah dengan meningkatkan asset tetap dan asset lainnya dengan mengeluarkan anggaran

daerahnya atau Belanja Modal Kota Langsa. Besar kecilnya Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan pendapatan lain-lain yang sah, termasuk salah satunya adalah Pendapatan Hibah.<sup>65</sup>

Untuk lebih memperkaya literatur data peneliti tentang Belanja Modal, maka peneliti memfokuskan analisis penelitian pada variabel PAD, Pendapatan Hibah dan DAK yang dapat mempengaruhi Belanja Modal di Kota Langsa.



**Gambar2.1 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal**

<sup>65</sup>Lailatul Mubasiroh, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 2018), h. 20



## 2.7 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a.  $H_{o1}$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa  
 $H_{a1}$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa
- b.  $H_{o2}$  = Pendapatan Hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modalkota Langsa  
 $H_{a2}$  = Pendapatan Hibah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modalkota Langsa
- c.  $H_{o3}$  = Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa  
 $H_{a3}$  = Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa
- d.  $H_{o4}$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal kota Langsa  
 $H_{a4}$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal kota Langsa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga desain penelitian.<sup>66</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat ada pengaruh atau tidak antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Jenis data ini adalah *time series* dengan data sekunder yang diperoleh dalam periode 2011-2019.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kota Langsa secara keseluruhan yang diambil berdasarkan dokumentasi kepustakaan melalui data-data yang tersedia di Badan Pusat Statistik waktu yang dilakukan pada Periode 2011-2019, dengan tujuan untuk menguatkan data dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 30 Juli 2021.

---

<sup>66</sup>Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 40

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah kepustakaan diantaranya yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa, Kota Langsa Dalam Angka Tahun 2011-2019, Produk Domestik Regional Bruto Kota Langsa Menurut Lapangan Usaha 2011-2019, dan buku-buku serta jurnal penelitian yang mendukung penelitian ini.

### 3.4 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Satuan	Skala Data
1	Belanja Modal (Y) <sup>67</sup>	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi	Rupiah	Nominal
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) <sup>68</sup>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.	Rupiah	Nominal
3	Pendapatan Hibah (X2) <sup>69</sup>	Pendapatan hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri	Rupiah	Nominal

<sup>67</sup>Ibid., h, 130

<sup>68</sup>Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*,..h. 10

<sup>69</sup>Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*,.h, 120

		atau luar negeri yang tidak merugikan.		
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) <sup>70</sup>	Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.	Rupiah	Nominal

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengambilan dari dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga ataupun institusi. Penelitian mendapatkan data dari dokumen-dokumen yang bersumber dari Badan Pusat statistik (BPS) yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa, Kota Langsa Dalam Angka Tahun 2011-2019, Produk Domestik Regional Bruto Kota Langsa Menurut Lapangan Usaha 2011-2019.

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Uji Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk melihat apakah terdapat hubungan antara

---

<sup>70</sup>Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang :UB Press, 2017), h. 24

variabel independen dan variabel dependen yang berhubungan positif atau berhubungan negatif.<sup>71</sup>

Adapun variabel indenpennya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Pendapatan Hibah (X2), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) dengan variabel dependennya yaitu Belanja Modal (Y). Persamaan yang digunakan pada regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal

x1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

x2 = Pendapatan Hibah

x3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

$\alpha$  = Nilai Konstanta

$\beta$  = Koefisien

e = *Error Term*

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas dapat menggunakan alat statistik seperti excel statistik atau pun dengan menggunakan SPSS baik secara uji nonparametrik ataupun secara uji grafik.

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, h.32

Adapun dalam pengambilan keputusannya, jika probabilitas lebih besar ( $>$ ) dari 0.05 maka  $H_0$  diterima, namun sebaliknya jika probabilitas lebih kecil ( $<$ ) dari 0.05 maka  $H_0$  ditolak.<sup>72</sup>

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel independen pada model regresi saling berkorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah melihat nilai *tolerance value* atau *Variance Inflation Faktor* (VIF) dengan ketentuan pengambilan keputusan yang dapat dilihat sebagai berikut.<sup>73</sup>

Apabila *tolerance value*  $> 0,1$  dan  $VIF < 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen dan variabel dependen. Apabila *tolerance value*  $< 0.1$  dan  $VIF > 10$ , maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dan variabel dependen.

## 3. Uji Autokorelasi

Uji auto korelasi menjelaskan bahwa persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk tujuan mendeteksi apakah terjadi korelasi antara residu pada periode saat ini(t)

---

<sup>72</sup>Rina Novianty A dan Siti Noni E, *Metode Kuantitatif Praktis*, (Bandung:PT.Bima Pratama Sejahtera, 2018), h.21

<sup>73</sup>*Ibid.*,h.26

dengan residu pada periode yang sebelumnya ( $t-1$ ), adapun untuk menentukan apakah sebuah penelitian itu mengalami autokorelasi adalah dengan menggunakan uji statistik yaitu dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut :<sup>74</sup>

- Apabila  $dw < dl$ , maka terjadi autokorelasi negatif,
- Apabila  $dl < dw < du$ , maka tidak dapat disimpulkan,
- Apabila  $du < dw < 4-du$ , maka tidak terjadi autokorelasi negatif dan positif,
- Apabila  $4-du > dw > 4-dl$ , maka tidak dapat disimpulkan,
- Apabila  $4-dl < dw$ , maka terjadi autokorelasi positif.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah suatu pengujian asumsi untuk melihat apakah dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* dari residu satu pengamatan kepengamatan lainnya. Jika variabel residual dari satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah peneliti itu terdapat gejala heteroskedastisitas ataupun tidak, maka model yang baik untuk melakukannya adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h.30

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 28

- Jika pada grafik *scatterplot* ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (gelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika pada grafik *scatterplot* tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar ke atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

#### 1. Uji T

Uji t atau bisa disebut juga dengan uji parsial adalah uji yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Adapun uji t ini dilihat dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Adapun kaidahnya yaitu:<sup>76</sup>

Kaidah 1 :  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh yang signifikan.

Kaidah 2 :  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Penting juga untuk dipahami bahwa tanda negatif pada  $t_{hitung}$  bukan berarti nilainya dibawah 0, melainkan itu adalah arah pengaruh. Jadi nilai  $t_{hitung}$  diambil nilai mutlaknya atau nilai absolutnya.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: BadanPenerbitUNDIP,2005),h.89

<sup>77</sup> Ibid., h.89



Dalam pengambilan keputusan juga dengan melihat nilai signifikansi. Yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha(5\%)$  dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- Jika nilai signifikan  $<5\%$ , maka  $H_0$  ditolak.
- Jika nilai signifikan  $>5\%$ , maka  $H_0$  diterima.

## 2. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel yang meliputi: PAD, Pendapatan Hibah, DAK terhadap Belanja Modal di kota Langsa, yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ) atau dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel apabila ( $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ) maka model regresi signifikan secara statistik dan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak.<sup>79</sup>

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data simple. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) biasanya digunakan untuk melihat seberapa jauh tingkat pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi ini memiliki kelemahan yakni bisa terhadap jumlah variabel

---

<sup>78</sup>Ibid., h.89

<sup>79</sup>Ibid., h.88

bebasyang dimasukkan dalam model regresi dimana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai  $R^2$ , meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantungnya. Adapun untuk menutupi kelemahan tersebut maka digunakanlah koefisien determinasi yang telah disesuaikan yaitu, *Adjusted R Square* ( $R^2_{adj}$ ), yang berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang telah digunakan.<sup>80</sup>

Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinan dengan mengkuadratkannya. Dikatakan koefisien determinan jika standarnya  $K_d$  mendekati 0, maka pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen lemah dan jika  $K_d$  mendeteksi 1, maka pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen kuat. Besarnya koefisien determinan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :<sup>81</sup>

$$K_d = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan :

$K_d$  = Koefisien determinan

$r^2$  = Koefisien korelasi

---

<sup>80</sup>Ibid.,h.87

<sup>81</sup>Ibid.,h.87

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perekonomian Kota Langsa

Setelah kota Langsa lepas dari Kabupaten Aceh Timur tahun 2001 struktur perekonomian dibangun atas perdagangan, industri, dan pertanian. Sejak lama Langsa dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa, khususnya hasil bumi dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan paling banyak dari Medan, Sumut. Kota Langsa merupakan kota pesisir yang memiliki garis pantai 16km. penduduk yang sangat heterogen yaitu Aceh, Jawa, Melayu, Gayo, Batak, dan Karo. Hanya berjarak 246 km dari Kota Medan, menyebabkan Langsa memiliki banyak kemiripan dengan Medan.<sup>82</sup>

Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas 17 kategori ekonomi. Struktur ekonomi sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh seluruh kategori ekonomi terhadap pembentukan PDRB di suatu wilayah pada waktu tertentu. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu (time series) maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran dalam struktur

---

<sup>82</sup>Tgk. Usman Abdullah, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Langsa 2016*, (Langsa:Pemerintah Kota Langsa, 2017), h. 3

ekonomi di suatu wilayah diakibatkan adanya perkembangan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing kategori perekonomian di wilayah tersebut.<sup>83</sup>

Secara umum struktur perekonomian Kota Langsa didominasi oleh tiga kategori utama yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori Jasa-Jasa, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Konstruksi, kategori Transportasi, Pergudangan, dan Jasa Penunjang Angkutan (Pos dan Kurir). Sejak beberapa tahun terakhir mulai terjadi pergeseran struktur ekonomi. Kontribusi kategori pertanian tidak lagi mendominasi terhadap perekonomian Kota Langsa. Hal ini menjadikan kategori konstruksi dan kategori transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian. Kondisi daerah perkotaan seperti yang terjadi di Kota Langsa cenderung menitikberatkan perekonomian pada kategori non pertanian. Hal ini sesuai dengan wilayah yang berstatus kota, dimana perekonomian bertumpu pada kategori non pertanian.<sup>84</sup>

Objek dari penelitian ini adalah daerah Kota Langsa. Kota Langsa merupakan salah satu kota dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Jumlah Kecamatan di Kota Langsa berjumlah 5 Kecamatan. Kota Langsa sebelah Utara berbatasan dengan

---

<sup>83</sup>Ibid., h. 6

<sup>84</sup>Ibid., h. 6

Kabupaten Timur dan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan Aceh Tamiang.<sup>85</sup>



**Gambar 4.1 Peta Kota Langsa**

Secara administrasi, Kota Langsa terdiri dari 5 Kecamatan yaitu : Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Baro, dan Langsa Kota.<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Langsa Dalam Angka 2011 diakses dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pada jam 23:33 WIB

<sup>86</sup>Tgk. Usman Abdullah, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Langsa 2016*,... h. 3

## 4.2 Deskripsi Data Penelitian

### 4.2.1 Analisis Deskripsi

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* yakni periode 2011-2019. Variabel dalam penelitian yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Pendapatan Hibah (X2), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) dan Belanja Modal (Y). Data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik. Secara umum data dapat ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal**

Periode	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Hibah (Rp)	Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2011	21.612.909.830	1.357.796.000	26.685.800.000	95.365.497.758
2012	16.670.272.466	996.000.000	23.605.000.000	48.593.745.283
2013	57.242.418.960	4.662.333.000	29.921.000.000	50.759.677.271
2014	114.168.702.058	3.500.000.000	32.355.000.000	149.426.250.972
2015	108.924.585.107	1.825.000.000	44.250.000.000	162.348.727.994
2016	121.369.467.375	18.031.183.763	187.184.335.202	294.379.982.765
2017	120.077.234.984	16.544.880.500	211.722.423.308	333.296.714.479
2018	121.360.976.034	17.124.120.000	131.946.202.463	207.320.202.350
2019	120.504.670.904	16.515.040.000	146.296.436.065	198.592.250.990

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Data Telah Diolah<sup>87</sup>

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa PAD, Pendapatan Hibah, DAK, dan Belanja Modal terjadi fluktuasi. Dimana Pada periode 2014 PAD mengalami kenaikan karena PAD terealisasi dengan melebihi target yaitu sejumlah Rp.114.168.702.058 dari target sebesar Rp.105.021.202.287.<sup>88</sup> Pada periode 2012

<sup>87</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pada jam 15:17 WIB

<sup>88</sup>Laporan Zubir, *Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa*, Diakses dari <http://www.aceh.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pada jam 10:17 WIB

Pendapatan Hibah mengalami penurunan karena pertumbuhan pertambangan dan penggalan berkurangnya titik-titik lokasi penggalan pasir dikota Langsa.<sup>89</sup> Dapat dilihat peningkatan DAK setiap tahunnya terjadi fluktuasi, namun bukan berarti pemerintah kota Langsa tidak mempunyai kapabilitas dalam meningkatkan Belanja Modal, yang dibuktikan dengan keberhasilan pada periode 2014, 2015, 2016, dan 2017.<sup>90</sup>

#### 4.2.2 Deskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.<sup>91</sup>

**Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa  
Periode 2011-2019**

No	Periode	Penerimaan PAD
1	2011	21.612.909.830
2	2012	16.670.272.466
3	2013	57.242.418.960
4	2014	114.168.702.058
5	2015	108.924.585.107
6	2016	121.369.467.375
7	2017	120.077.234.984
8	2018	121.360.976.034
9	2019	120.504.670.904

**Sumber: Badan Pusat Statistik Langsa Data Telah Diolah<sup>92</sup>**

<sup>89</sup> Tgk. Usman Abdullah, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Langsa Tahun Anggaran 2016, ...h, 50*

<sup>90</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pada jam 15:17 WIB

<sup>91</sup> Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, ... h. 10*

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa PAD terjadi fluktuasi. Pada periode 2014 PAD mengalami kenaikan, dimana kenaikan PAD terjadi karena bisa terealisasi melebihi target yaitu sejumlah Rp.114.168.702.058 dari target sejumlah Rp.105.021.202.287. Namun keberhasilan meningkatkan PAD melebihi target tersebut tidak berhasil menstimulasi realisasi PAD pada periode-periode berikutnya. Pada periode 2019 realisasi PAD tidak sesuai dengan Target karena pemerintah kota Langsa harus membayar tunggakan klaim pembayaran BPJS kesehatan senilai Rp.36 Miliar lebih. Sehingga jika tidak ada tunggakan tersebut, maka total PAD murni mencapai Rp.157 Miliar lebih.<sup>93</sup>

#### 4.2.3 Deskripsi Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak merugikan.<sup>94</sup>

**Tabel 4.3 Pendapatan Hibah Kota Langsa  
Periode 2011-2019**

No	Periode	Pendapatan Hibah
1	2011	1.357.796.000
2	2012	996.000.000
3	2013	4.662.333.000
4	2014	3.500.000.000
5	2015	1.825.000.000

<sup>92</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pada jam 08:17 WIB

<sup>93</sup>Laporan Zubir, *Reaisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa*, Diakses dari <http://www.aceh.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pada jam 10:17 WIB

<sup>94</sup>Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah,..* h, 120



6	2016	18.031.183.763
7	2017	16.544.880.500
8	2018	17.124.120.000
9	2019	16.515.040.000

**Sumber: Badan Pusat Statistik Langsa Data Telah Diolah<sup>95</sup>**

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah mengalami fluktuasi. Pendapatan Hibah pada periode 2012 mengalami penurunan 26% dikarenakan pertumbuhan pertambangan dan penggalian berkurangnya titik-titik lokasi penggalian pasir di kota Langsa. Namun pada periode 2013 mengalami kenaikan 368 % dan meningkat secara dratis pada periode 2016 sebesar 888% karena terealisasi sesuai dengan anggarannya.<sup>96</sup>

#### **4.2.4 Deskripsi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.<sup>97</sup>

**Tabel 4.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Langsa  
Periode 2011-2019**

<b>No</b>	<b>Periode</b>	<b>DAK</b>
1	2011	26.685.800.000
2	2012	23.605.000.000
3	2013	29.921.000.000
4	2014	32.355.000.000
5	2015	44.250.000.000
6	2016	187.184.335.202

<sup>95</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pada jam 08:17 WIB

<sup>96</sup>Tgk. Usman Abdullah, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Langsa Tahun Anggaran 2016*, ...h, 60

<sup>97</sup>Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang :UB Press, 2017), h. 24

7	2017	211.722.423.308
8	2018	131.946.202.463
9	2019	146.296.436.065

**Sumber: Badan Pusat Statistik Langsa Data Telah Diolah<sup>98</sup>**

Pada tabel 4.4 dapat dilihat peningkatan DAK setiap tahun terjadi fluktuasi. Pada periode 2012 DAK mengalami penurunan sebesar 11 %, penurunan DAK terjadi karena masih belum optimalnya pendayagunaan aset daerah. Namun pada periode berikutnya yaitu 2016 DAK mengalami kenaikan secara dratis sebesar 323 %, kenaikan DAK terjadi karena sudah termaksimalnya pendayagunaan aset daerah.<sup>99</sup>

#### 4.2.5 Deskripsi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>100</sup>

**Tabel 4.5 Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019**

No	Periode	Belanja Modal
1	2011	95.365.497.758
2	2012	48.593.745.283
3	2013	50.759.677.271
4	2014	149.426.250.972
5	2015	162.348.727.994
6	2016	294.379.982.765
7	2017	333.296.714.479
8	2018	207.320.202.350
9	2019	198.592.250.990

**Sumber: Badan Pusat Statistik Langsa Data Telah Diolah<sup>101</sup>**

<sup>98</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pada jam 15:17 WIB

<sup>99</sup>Tgk. Usman Abdullah, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Langsa Tahun Anggaran 2016*, ...h, 61-62

<sup>100</sup>Ibid., h, 130

Berdasarkan tabel diatas, belanja modal terus mengalami fluktuasi. Belanja Modal terendah terjadi pada periode 2012 sebesar Rp. 48.593.745.283 dan Belanja Modal tertinggi terjadi pada periode 2017 yaitu sebesar 333.296.714.479. Jika dilihat secara keseluruhan dari Belanja Modal di kota Langsa mengalami fluktuasi. Adapun kenaikan Belanja Modal dari periode 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 dikarenakan pihak pemerintah memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana umum yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian pada periode 2018 dan 2019 jumlah Belanja Modal mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan penerimaan daerah Kota Langsa.<sup>102</sup>

### **4.3 Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Uji Asumsi Klasik**

##### 1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat apakah data berdistribusi dengan normal, maka dapat dilihat dari hasil pengujian normalitas data yang menggunakan alat IBM SPSS 23.0 dibawah ini:

---

<sup>101</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 2 /5 Mei 2021 pada jam 15:17 WIB

<sup>102</sup> Asnidar, *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa*, (Langsa:UNSAM, 2019), h. 10-11

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000102
	Std. Deviation	18077657555,9
		9269000
Most Extreme Differences	Absolute	,207
	Positive	,164
	Negative	-,207
Kolmogorov-Smirnov Z		,207
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

**Sumber: Data Sekunder Diolah,2021**

Adapun hasil dari pengujian dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa besarnya nilai *Kolmogrov-Smirnov* adalah 0.207 hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan ( $\alpha = 0.05$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  ditolak dengan menerima  $H_0$ . Artinya data residual berdistribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila data residual tidak berdistribusi normal. Apabila data residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistik menjadi tidak valid.

## 2) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen), dan cara yang digunakan untuk melihat apakah data terjadi multikolinieritas maka ketentuan itu

berpedoman pada nilai VIF  $< 10$  dan tolerance  $> 0.1$ , Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel Coefficients.

**Tabel 4.7**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,489	2,043
Pendapatan_Hibah	,101	9,942
DAK	,108	9,244

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal

**Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021**

Dari tabel 4.7 dapat disimpulkan pada pengujian multikolinearitas untuk variabel bebas (independen) adalah, sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	,489	2,043	Bebas Multikolinieritas
Pendapatan hibah	,101	9,942	Bebas Multikolinieritas
Dana Alokasi Khusus	,108	9,244	Bebas Multikolinieritas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai prediktor model regresi menunjukkan nilai VIF yang lebih kecil, dimana semuanya berada di bawah 10. Sedangkan nilai toleran semuanya di atas 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas atau tidak mempunyai korelasi dengan variabel lainnya.

### 3) Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berfungsi untuk melihat apakah data yang diteliti dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk melihat apakah data yang diteliti terdapat autokorelasi atau tidak maka dapat dilihat dari hasil uji korelasi yang dilihat pada tabel Model Summary pada kolom terakhir yaitu Durbin-Waston.

**Tabel 4.9**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,983 <sup>a</sup>	,967	,947	22866629054,9 9578	2,309

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, Pendapatan\_Hibah

b. Dependent Variable: Belanja\_Modal

**Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021**

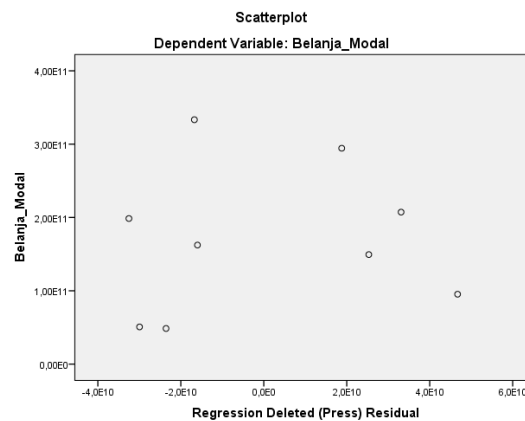
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai pada Durbin-Waston sebesar 2.309 dengan jumlah variabel independen,  $k = 3$ , didapat nilai  $du = 2,1282$ , sehingga syarat tidak terjadinya autokorelasi adalah :  $du < dw < 4 - du = 2,1282 < 2,309 < 1,8718$ , memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada data penelitian ini.

### 4) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk membuktikan apakah dalam penelitian yang dilakukan pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari

residu satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian jenis ini dilakukan dengan melihat gambar scatterplot atau bisa juga dibidang sebagai alur sebaran, yaitu seperti gambaran dibawah ini:

**Gambar 4.4**  
**Uji Scatterplot**



**Sumber: Data Sekunder Diolah,2021**

Berdasarkan hasil gambar 4.4 diatas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola apapun yang jelas atau teratur, serta titik-titik tersebut berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.3.2 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk melihat apakah terdapat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen yang berhubungan positif atau berhubungan

negatif. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh hasil uji pada tabel berikut :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**  
**Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1446,080	18317002376,152		,789	,466
PAD	,854	,260	,382	3,289	,022
Pendapatan_Hibah	-9,514	3,277	-,743	-2,903	,034
DAK	1,789	,322	1,370	5,553	,003

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal

**Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021**

Dari hasil analisis regresi berganda table 4.10, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1446,080 + 0,854X_1 - 9,514X_2 + 1,789X_3$$

Adapun interpretasi hasilnya sebagai berikut :

a. Nilai konstanta = 1446,080

Menunjukkan apabila variabel PAD, Pendapatan Hibah, DAK bernilai 0, maka Belanja Modal akan bertambah sebesar Rp.1.446.080.000.

b. Koefisien Pendapatan Asli Daerah ( X1) = 0,854

Berdasarkan hasil persamaan struktural tersebut diketahui bahwa variabel PAD berpengaruh positif. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai variabel PAD sebesar



Rp.1 Miliar dan nilai variabel lainnya tetap maka akan diikuti dengan peningkatan Belanja Modal sebesar Rp.854.000.000.

c. Koefisien Pendapatan Hibah ( X2) = -9,515

Berdasarkan hasil persamaan struktural tersebut diketahui bahwa variabel Pendapatan Hibah berpengaruh negatif. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai variabel Pendapatan Hibah sebesar Rp.1 Miliar dan nilai variabel lainnya tetap maka Belanja Modal akan menurun sebesar Rp.9.514.000.000.

d. Koefisien Dana Alokasi Khusus ( X3) = 1,789

Berdasarkan hasil persamaan struktural tersebut diketahui bahwa variabel DAK berpengaruh positif. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai variabel DAK sebesar Rp.1 Miliar dan nilai variabel lainnya tetap maka akan diikuti dengan peningkatan Belanja Modal sebesar Rp.1.789.000.000.

### 4.3.3 Uji Hipotesis

#### 1) Uji Parsial (Uji T)

Uji t biasanya digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing dari variabel independen secara individual terhadap variasi variabel dependen. Dalam regresi ini melihat pengaruh PAD , Pendapatan Hibah dan DAK terhadap Belanja Modal kota Langsa periode 2011-2019, dengan nilai signifikansi  $\alpha$  adalah 0.05(5%) dengan nilai *degree offreedom* (df) =5 (n-k-1=9-3-1), maka nilai yang diperoleh adalah 2.570.

Kriteria dalam menentukan hasil hipotesis dengan melakukan uji t adalah dengan membandingkan hasil dari T hitung dan T tabel, maka dapat diperoleh sebagai berikut:

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antar variabel.
- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel bebas secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel *Coefficients*

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1446,080	1831,152		,789	,466
PAD	,854	,260	,382	3,289	,022
Pendapatan_Hibah	-9,514	3,277	-,743	-2,903	,034
DAK	1,789	,322	1,370	5,553	,003

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal

**Sumber: Data Sekunder Diolah,2021**

Berdasarkan Uji t pada tabel 4.11, maka hasil dari uji analisis uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Penjelasan Hasil Uji T**

Variabel	T hitung	T tabel	Signifikan	Keterangan
PAD	3,289	2,570	0.022<0.05	Memiliki hubungan yang signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal
Pendapatan Hibah	-2,903	2,570	0.034< 0.05	Memiliki hubungan yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal
DAK	5,553	2,570	0.003< 0.05	Memiliki hubungan yang signifikan dan memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel PAD yang diperoleh nilai dari t hitung sebesar  $3,289 > t$  tabel  $2,570$ , berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak atau ada hubungan yang positif diantara kedua variabel. Dengan hasil signifikan sebesar  $0.022 < 0.05$  berarti signifikan serta variabel PAD memiliki nilai Koefisien Beta sebesar  $0.854$ , yang berarti apabila PAD naik Rp.1 Miliar, maka Belanja Modal akan naik sebesar Rp.854.000.000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di kota Langsa periode 2011-2019.

b. Pendapatan Hibah

Hasil analisis dari uji t menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Hibah dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar  $-2,903 > t_{tabel} 2.570$ , berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak atau memiliki hubungan yang negatif diantara kedua variabel. Dengan hasil signifikan sebesar  $0.034 < 0.05$  berarti signifikan serta variabel Pendapatan Hibah memiliki nilai Koefisien Beta sebesar  $-9,514$ , yang berarti apabila Pendapatan Hibah naik Rp.1 Miliar, maka Belanja Modal akan menurun sebesar Rp.9.514.000.000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Hibah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal di kota Langsa periode 2011-2019.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil analisis dari uji t menunjukkan bahwa variabel DAK dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar  $5,553 > t_{tabel} 2,570$  berarti berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak atau terdapat hubungan yang positif diantara kedua variabel. Dengan hasil signifikan sebesar  $0.003 < 0.05$  berarti signifikan serta variabel DAK memiliki nilai Koefisien Beta sebesar  $1.789$ , yang berarti apabila DAK naik Rp.1 Miliar, maka Belanja Modal akan naik sebesar Rp.1.789.000.000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di kota Langsa periode 2011-2019.

## 2) Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji variabel independen secara simultan dapat dilakukan dengan cara melakukan uji F. pada dasarnya uji F menunjukkan apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F statistik pada tabel **Anova** yang dilakukan pada SPSS 23 sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Analisis Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7673,000	3	2557,000	48,915	,000 <sup>b</sup>
Residual	2614,000	5	5228,000		
Total	7934,000	8			

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, Pendapatan\_Hibah

**Sumber: Data Sekunder Diolah,2021**

Berdasarkan dari olahan SPSS tabel 4.13 menunjukkan hasil bahwa F hitung sebesar 48.915 dengan hasil nilai sigifikansi sebesar 0.000, maka hasil ini dapat dibandingkan dengan nilai dari F tabel dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima apabila model regresi signifikan dan berpengaruh secara bersama-sama, hal ini dapat dilihat nilai  $df_1 = k - 1$  ( $3 - 1 = 2$ ) dan  $df_2 = n - k$  ( $9 - 3 = 6$ ). Sehingga hasil yang diperoleh dari  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu sebesar  $48.915 > 5.14$ , dengan taraf signifikan sebesar  $0.000 < 0.05$ , yang dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PAD, Pendapatan Hibah, dan DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal) di kota Langsa pada periode 2011-2019.

### 3) Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menjelaskan variasi variabel independen (PAD, Pendapatan Hibah, dan DAK) dipengaruhi oleh variasi nilai variabel dependen (Belanja Modal). Nilai koefisien determinasi dapat diukur dari *R-Square*.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,983 <sup>a</sup>	,967	,947	22866629054,99578	2,309

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, Pendapatan\_Hibah

b. Dependent Variable: Belanja\_Modal

**Sumber: Data Sekunder Diolah,2021**

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada R Square, dimana memiliki nilai sebesar 0.967, hal ini dapat dijelaskan bahwa variabel PAD, Pendapatan Hibah, dan DAK memiliki hubungan sebesar 96.7% terhadap Belanja Modal di kota Langsa pada periode 2011-2019. Sedangkan sisanya sebesar 3.3 % adalah kontribusi variabel yang tidak termasuk di dalam model regresi ini.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Analisis data untuk menguji hipotesis dengan uji t menunjukkan nilai t hitung variabel PAD adalah 3,289. Sedangkan untuk t tabel adalah 2,570 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,289 > 2,570$ ). Maka berdasarkan Kriteria pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kota Langsa. Dengan demikian semakin besar PAD maka semakin besar juga Belanja Modal tersebut, begitu juga sebaliknya, semakin kecil PAD maka semakin sedikit juga Belanja Modal. Semakin tinggi tingkat PAD maka akan membuat Belanja Modal meningkat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dedi Suprionto (2016), Mayang Sari Nasution (2018), Yeti Okta Rosiana (2017), Santika Adhi Karyadi (2017), dan Hanisya Ursilla Lubis (2019) yang menyatakan bahwa hasil variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Namun penelitian ini melemah hasil penelitian dari Nanda Dwi Novalia (2016), Yohanes Eko Adventino (2016) dan Nugroho

Suratno Putro (2010) menyatakan bahwa hasil variabel PAD tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

#### **4.4.2 Pengaruh Pendapatan Hibah Terhadap Belanja Modal**

Analisis data untuk menguji hipotesis dengan uji t menunjukkan nilai t hitung variabel Pendapatan Hibah adalah -2,903. Sedangkan untuk t tabel adalah 2,570 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (-2,903 > 2,570). Maka berdasarkan Kriteria pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Hibah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kota Langsa. Dengan demikian semakin besar Pendapatan Hibah maka semakin besar juga Belanja Modal tersebut, begitu juga sebaliknya, semakin kecil Pendapatan Hibah maka semakin sedikit juga Belanja Modal. Semakin rendah tingkat Pendapatan Hibah maka akan membuat Belanja Modal menurun.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Ayu Soraya (2017) yang menyatakan bahwa hasil variabel Pendapatan Hibah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel peningkatan taraf hidup masyarakat. Menurut penelitian Iman Sri Bintah (2017), dan Yohanes Eko Adventino menyatakan bahwa hasil variabel Lain-lain Pendapatan Yang Sah dimana yang terdiri dari Pendapatan Hibah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.



#### **4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Analisis data untuk menguji hipotesis dengan uji t menunjukkan nilai t hitung variabel DAK adalah 5,553. Sedangkan untuk t tabel adalah 2,570 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,553 > 2,570$ ). Maka berdasarkan Kriteria pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel DAK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kota Langsa. Dengan demikian semakin besar DAK maka semakin besar juga Belanja Modal tersebut, begitu juga sebaliknya, semakin kecil DAK maka semakin sedikit juga Belanja Modal. Semakin tinggi tingkat DAK maka akan membuat Belanja Modal meningkat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santika Adhi Karyadi (2017) dan Hanisya Ursilla Lubis (2019) yang menyatakan bahwa hasil variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

#### **4.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Hasil uji koefisien regresi secara simultan (uji F) diperoleh Fhitung sebesar 48,915. diketahui Ftabel adalah 5,14. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung  $>$  Ftabel adalah ( $48,915 > 5,14$ ) maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel PAD, Pendapatan Hibah dan DAK (secara simultan) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal kota Langsa.

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,967. Nilai ini memberikan arti bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel PAD, Pendapatan Hibah dan DAK terhadap Belanja Modal sebesar 96,7 % sedangkan sisanya 3,3 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang di luar penelitian ini.

Dari hasil deskripsi data penelitian disimpulkan bahwa PAD, Pendapatan Hibah dan DAK kota Langsa dalam kategori baik. Setelah dilakukan analisis regresi linear berganda yaitu untuk mengukur pengaruh Belanja Modal, persamaan regresinya adalah  $Y = 1446,080 + 0,854 X_1 - 9,514 X_2 + 1,789 X_3$ . Dengan persamaan tersebut menyatakan bahwa nilai konstanta 1446,080 menunjukkan apabila variabel PAD, Pendapatan Hibah dan DAK bernilai nol, maka Belanja Modal bertambah Rp1.446.080.000, artinya jika variabel besar lain nilainya tetap dan variabel PAD mengalami peningkatan Rp.1 Miliar, maka Belanja Modal meningkat sebesar Rp.854.000.000. Koefisien regresi Pendapatan Hibah -9,514 artinya jika variabel bebas lain nilainya tetap dan variabel Pendapatan Hibah mengalami peningkatan Rp.1 Miliar, maka Belanja Modal menurun sebesar Rp.9.514.000.000. Koefisien regresi DAK 1,789 artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel DAK mengalami peningkatan Rp1 Miliar, maka Belanja Modal meningkat sebesar Rp1.789.000.000.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh PAD, Pendapatan Hibah, dan DAK terhadap Belanja Modal Kota Langsa Periode 2011-2019, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) untuk variabel PAD, Pendapatan Hibah dan DAK yaitu :
  - a. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis secara parsial (uji t) untuk variabel PAD diperoleh, nilai koefisien regresi sebesar 0,854 dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,289 > 2,570$ ) dengan signifikan  $0,022 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa.
  - b. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis secara parsial (uji t) untuk variabel Pendapatan Hibah diperoleh, nilai koefisien regresi sebesar -9,514 dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-2,903 > 2,570$ ) dengan signifikan  $0,034 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu variabel Pendapatan Hibah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa.
  - c. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis secara parsial (uji t) untuk variabel DAK diperoleh, koefisien regresi sebesar 1,789 dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$

(5,553>2,570) dengan signifikan  $0,003 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa.

2. Berdasarkan criteria pengujian hipotesis secara simultan (uji f) untuk variabel PAD, Pendapatan Hibah, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kota Langsa, hal ini dibuktikan dengan nilai F sig sebesar  $(0,000) < \alpha$  (0,05)

## **5.2 SARAN**

Penelitian ini masih sangat sederhana dengan menggunakan periode pendek hanya berkisar 9 periode maka hasil penelitian ini kemungkinan besar masih saja bisa berubah tergantung dari jumlah data didapat. Oleh sebab itu peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat melengkapi data penelitian ini sehingga didapat hasil yang lebih akurat.

Untuk pemerintah agar memperbanyak jumlah Pendapatan PAD dari pada Pendapatan Hibah, karena terbukti dari hasil penelitian bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Tgk. Usman. 2017. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Langsa 2016*. Langsa
- Adventino, Yohanes Eko. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Balik Papan*. Yogyakarta
- Anggoro, Dams Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang:UB Press
- Asnidar. 2019. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa*. Langsa
- Badan Pusat Statistik (<https://langsakota.bps.go.id>)
- Bintang, Imam Sri. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang*. Palembang
- Fahrunisah, Noora , Dan Achmad Badjuri, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015)*. Semarang
- Feriza, Aulia dan Meita Jumiarti. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Langsa Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Langsa; Badan Pusat Kota Langsa
- Fikri, Rijalul Ahmad. 2017. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*. Medan
- Fiqih, Abdul. 2010. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Pada Tahun 2004-2008*. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Karyadi, Santika Adhi. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.* Yogyakarta

Kementrian Keuangan ( <https://www.kemenkeu.go.id>)

Lubis, Hanisya Ursilla. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan)*. Medan

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Mubasiroh, Lailatul. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi

Munfarida,Wafiq Khotul, 2017.*Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Kabupaten/Kota DiJawa Tengah*. Surakarta

N, Majidi, 1997. *Anggaran Pembangunan Dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah*. Jakarta

Nasution, Mayang Sari. 2018.*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal (studi kasus badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten deli serdang)*. Medan

Novalia, Nanda Dwi. 2016.*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung*,Bandar Lampung

NoviantyA, RinadanSitiNoniE. 2018.*MetodeKuantitatifPraktis*. Bandung:PT.Bima PratamaSejahtera

Nuarisa, Heila Ardhian. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran (studi kasus pada pemerintahan kabupaten/kota jawa tengah*. Semarang; Universitas Negeri Semarang

Nurjannah, Siti. 2018. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung

Peraturan Menteri Keuangan (<https://jdih.kemenkeu.go.id>)

Putro, Nugroho Suratno. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang

Rahmadhani, Febby Kurnia. 2019. *Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transferan Terhadap Pendapatan Perkapita Di Kota Medan.*, Medan: FEBI

Rinaldi, Abel. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang; Universitas Muhammadiyah Palembang

Rosiana, Yeti Okta. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi*. Lampung

Sartika. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*. Yogyakarta

Siagian, Erlinda. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi

Soraya, Dewi Ayu. 2017. *Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kelurahan Yosorejo Metro Timur*. Lampung: FEBI

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta

Suprianto, Dedi. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya*. Meulaboh

Suwanda, Dadang. 2014. *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit PPM

Syahrudin dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah



Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajwali Pers

Yoyo. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 :Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal

<b>Periode</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)</b>	<b>Pendapatan Hibah (Rp)</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rp)</b>	<b>Belanja Modal (Rp)</b>
2011	21.612.909.830	1.357.796.000	26.685.800.000	95.365.497.758
2012	16.670.272.466	996.000.000	23.605.000.000	48.593.745.283
2013	57.242.418.960	4.662.333.000	29.921.000.000	50.759.677.271
2014	114.168.702.058	3.500.000.000	32.355.000.000	149.426.250.972
2015	108.924.585.107	1.825.000.000	44.250.000.000	162.348.727.994
2016	121.369.467.375	18.031.183.763	187.184.335.202	294.379.982.765
2017	120.077.234.984	16.544.880.500	211.722.423.308	333.296.714.479
2018	121.360.976.034	17.124.120.000	131.946.202.463	207.320.202.350
2019	120.504.670.904	16.515.040.000	146.296.436.065	198.592.250.990

## Lampiran 2 : Hasil Analisis Pengolahan Data SPSS 23.0

### 1. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000102
	Std. Deviation	18077657555,9
		9269000
Most Extreme Differences	Absolute	,207
	Positive	,164
	Negative	-,207
Kolmogorov-Smirnov Z		,207
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

### 2. Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,489	2,043
Pendapatan_Hibah	,101	9,942
DAK	,108	9,244

## 3. Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

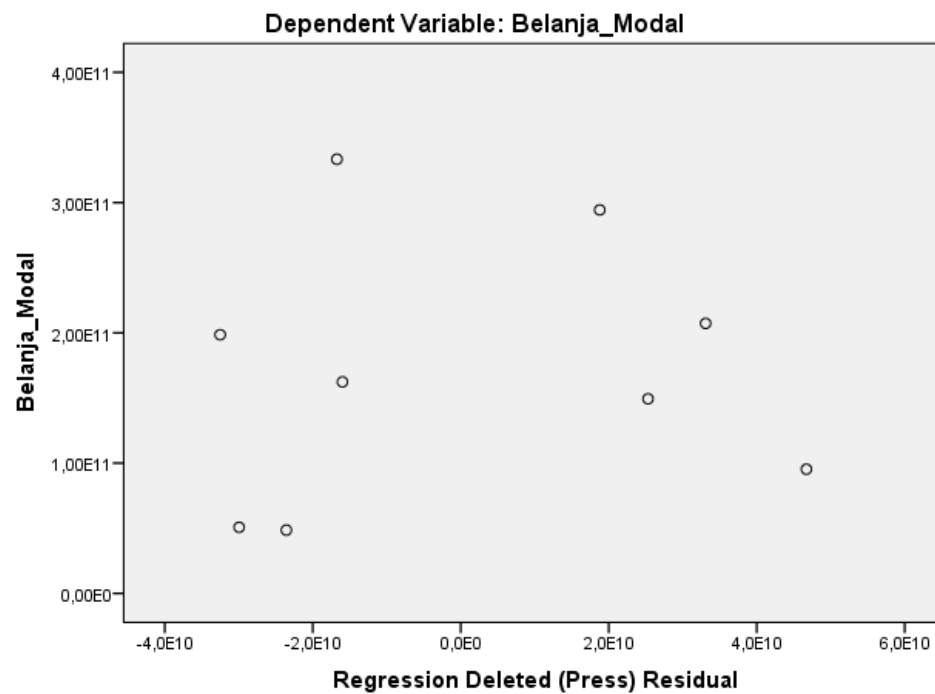
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,983 <sup>a</sup>	,967	,947	22866629054,99578	2,309

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, Pendapatan\_Hibah

b. Dependent Variable: Belanja\_Modal

## 4. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



## 5. Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1446,080	18317002376,152		,789	,466
PAD	,854	,260	,382	3,289	,022
Pendapatan_Hibah	-9,514	3,277	-,743	-2,903	,034
DAK	1,789	,322	1,370	5,553	,003

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal

## 6. Uji Parsial (Uji T)

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1446,080	1831,152		,789	,466
PAD	,854	,260	,382	3,289	,022
Pendapatan_Hibah	-9,514	3,277	-,743	-2,903	,034
DAK	1,789	,322	1,370	5,553	,003

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal

## 7. Uji Simultan (Uji F)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7673,000	3	2557,000	48,915	,000 <sup>b</sup>
Residual	2614,000	5	5228,000		
Total	7934,000	8			

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, Pendapatan\_Hibah

8. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,983 <sup>a</sup>	,967	,947	22866629054,99578	2,309

c. Predictors: (Constant), DAK, PAD, Pendapatan\_Hibah

d. Dependent Variable: Belanja\_Modal

**Lampiran 3 : Tabel T**  
**Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)**

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563

38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688



**Lampiran 4 : Tabel F**  
**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 243 TAHUN 2021  
T E N T A N G  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 06 Juli 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **Dr. Early Ridho Kismawadi, MA** sebagai Pembimbing I dan **Chahayu Astina, SE. M.Si** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Zahratul Syafarah**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012017068, dengan Judul Skripsi : **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kota Langsa Tahun 2011-2019"**.
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
Pada Tanggal : 16 Juni 2021 M  
05 Zulqad'ah 1442 H

Dekan,

Iskandar

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zahratul Syafarah
2. Nim : 4012017068
3. Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Tunong, 13 Febuari 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Keude Baro, Dsn. Pante Bidari, Kec. Pante Bidari, Kab.Aceh Timur
9. No Hp/ email : 082282468210/  
zahratulsyafarahzulkifli@gmail.com
10. Pekerjaan : Mahasiswi
11. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Zulkifli ( Almarhum)
  - b. Ibu : Safrida
  - c. Pekerjaan Ibu : IRT
12. Pendidikan
  - a. SD : MIN Meunasah Teungoh 2011
  - b. SMP : SMPN 1 Pante Bidari 2014
  - c. SMA : SMAN 1 Pante Bidari 2017
  - d. PTN : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah IAIN Langsa, masuk Tahun 2017 s/d 2021

Lhoknibong, 16 Desember 2021

Penulis,

Zahratul Syafarah